

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUDIDAYAAN IKAN KERAPU (Studi Di Dinas perikanan Kabupaten Situbondo)

Siska Andarwati 1610511050 Dr. Emy Kholifah R, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu
Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “ Implementasi Program Pmbudidayaan Ikan Kerapu (Studi Di Dinas Perikanan Kabupaten itubondo)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau Kabupaten Situbondo, dan Bagian Penyusunan Program Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam pelaksanaan program pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo masih mengalami beberapa hambatan, adapun faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Permbudidayaan Ikan Kerapu ebagai Berikut : (a) Standar dan Tujuan Kebijakan Program Pembenihan Kerapu : dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. (b) Sumber Daya : sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah memadai. (c) Karakteristik agen pelaksana : organisasi pelaksana mendukung program pembudidayaan ikan kerapu. (d) Sikap para pelaksana : masih kurang baik. (e) Komunikasi Organisasi Pelaksana : Organisasi pelaksana mulai dari melalui UPT PBAPAT, BBAP, dan UBL memiliki hubungan baik dalam membudidayakan ikan kerapu. (f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik : Kondisi lingkungan di Kabupaten Situbondo mendukung program pembudidayaan ikan kerapu.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembudidayaan Ikan Kerapu

ABSTRACT

This research aims to describe “ Implementation of Grouper Aquaculture Program (Study in the Fisheries Office of the Regency of Situbondo)”. In this study using a qualitative approach. Source of data ware obtained from the Technical Services Unit for Freshwater / Brackish Aquaculture Fisheries in the Situbondo Regency, and the Situbondo District Fisheris Service Program Drafting Section. Data collection through interviews, obsertation and documentation. In the implementation of groupe aquaculture program in Situbondo Regency, there are still some obstacles, while the supporting and inhibiting factors in the Implementation of Grouper Aquaculture Cultivation Program are as follows: (a) Policy Group Standard and Purpose: From 2014 to 2017there has been an increase but in 2018 decrease. (b) Resources: human resources and budgetary resources are adequate. (c) Characteristic of implementing agencies: implementing organizations support the grouper fish cultivation program. (d) The attitude of the implementers: still not good. (e) Communication of implementing Organizations: Implementing organization starting from UPT PBATAP, BBAP, and UBL have a good relationship in cultivating grouper fish. (f) Economic, Social, And Political Enviroument: The Inviroumental condition in Situbondo Regency Support the Grouper cultivation progam.

Keyword : Policy Implementation, Grouper Cultivation

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia ketahanan pangan menjadi isu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sepesat-pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar manusia dan tetap menjadi hal yang utama. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang ke 4 di dunia. Dengan hal itu Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keaneka ragaman biota laut. Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang ke 4 di dunia sekaligus produsen perikanan terbesar kedua di dunia, Indonesia bisa mengandalkan wilayah kelautannya untuk dijadikan sebagai kawasan ketahanan pangan. Potensi itu sangat besar dan bisa digali lebih jauh dengan cara mengelola dengan baik potensi yang ada.

Dalam suatu negara, kebutuhan pangan adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk melanjutkan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Sektor perikanan sebagai bagian dari sumber daya maritim keberadaannya sangat strategis dalam memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Sektor perikanan budidaya menjadi salah satu sumberdaya yang sangat diandalkan ke depan utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia dituntut untuk bekerja keras untuk mencari solusi bagaimana memenuhi kebutuhan pangan ditengah fenomena ledakan penduduk yang seolah-olah tak bisa dikendalikan. Fenomena pergeseran orientasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global yang lebih mengedepankan pada konsumsi pangan yang aman dan menyehatkan, telah secara langsung memicu tingginya permintaan terhadap kebutuhan protein alternatif. Dengan kata lain pola konsumsi tersebut telah bergeser dari produk pangan berbasis daging merah ke arah produk pangan yang berbasis daging putih dalam

hal ini ikan. Food and agriculture organization (FAO) dalam rilisan datanya menyimpulkan bahwa Tingkat konsumsi ikan masyarakat saat ini cenderung meningkat signifikan, sedangkan tingkat konsumsi daging merah saat ini cenderung menurun.

Dengan semakin tingginya permintaan terhadap konsumsi perikanan, negara-negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada kekhawatiran adanya fakta bahwa perikanan tangkap yang dilakukan secara over eksploitatif lambat laun akan menurunkan potensi kelestarian sumber daya ikan yang ada. Fenomena over fishing dan kerusakan habitat akan menjadi faktor menurunnya supply produksi ikan, jika tidak dilakukan pengelolaan ikan secara baik ditakutkan sumberdaya ikan akan terus menurun bahkan sampai habis. Untuk kedepannya sektor perikanan budidaya merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan besar ketahanan pangan masyarakat global.

Mengingat kekhawatiran adanya fakta bahwa perikanan tangkap yang dilakukan secara terus-menerus lambat laun akan menurunkan potensi kelestarian sumber daya ikan yang ada. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengembangkan budidaya ikan kerapu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo memiliki program salah satunya program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini berkaitan dengan instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Pecaron. Selain itu, program ini juga dapat bekerjasama dengan Unit Budidaya Laut Kembang Sambi, dibawah naungan Dinas Perikanan Prop. Jawa Timur. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo selama ini dikenal sebagai rumah dari ikan kerapu. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) adalah bagian dari kementerian yang ada di

Kabupaten. Hampir semua jenis ikan kerapu dibudidayakan dan dikembangkan di balai tersebut, sampai ikan kerapu hasil persilangan yang biasa dikenal dengan sebutan kerapu *hibrid*. BPBAP Situbondo saat ini sudah bisa mengembangkan kerapu persilangan antara kerapu Kertang dengan kerapu Macan dan disebut kerapu Cantang. Selain kerapu Cantang, ada juga hasil *hibrid* dari kerapu Macan dengan kerapu Batik yaitu kerapu Cantik. BPBAP Situbondo memiliki induk-induk kerapu yang sangat produktif baik kerapu Macan, Bebek, Kertang, dan Batik dan sudah digunakan oleh masyarakat pembenih khususnya yang ada di daerah Situbondo. Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas hasil perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Tingginya komoditas ini juga disebabkan karena ketersediaannya di alam bebas mulai berkurang. Sejalan dengan permintaan ikan kerapu yang semakin tahun semakin bertambah, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya dalam melayani permintaan hotel dan restoran, maupun sebagai komoditas ekspor yang akhir-akhir ini semakin besar permintaannya maka sangat baik bila memilih membudidayakan ikan kerapu.

Di Kabupaten Situbondo Pembibitan ikan kerapu sedang di kembangkan di pantai utara pulau Jawa, yaitu pantai pasir putih Situbondo, Jawa Timur. Tepatnya pantai Desa Klatakan, kecamatan Kendit, Situbondo. Kabupaten situbondo merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pembibitan ikan kerapu. Situbondo merupakan sentra produsen benih kerapu terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Di Situbondo ada sekitar 100 hektar atau panti pembenihan ikan skala rumah tangga yang mengembangkan produksi pembenihan ikan kerapu. Dengan jumlah pembudidaya kerapu lebih dari 140 orang.

Hasil dari budidaya ikan kerapu di Situbondo sudah di ekspor langsung oleh pedagang ke Hongkong dan China. jenis kerapu yang di ekspor ialah jenis Kerapu Cantik. Ikan kerapu cantik, yang merupakan hasil persilangan ikan kerapu macan dan ikan kerapu batik. Ikan kerapu Situbondo juga sudah terjamin kualitasnya. Ada beberapa alasan mengenai ikan kerapu perlu dibudidayakan, diantaranya: kerapu

merupakan komoditas perikanan yang memiliki peluang ekspor yang sangat menarik yang selama ini perlu dimanfaatkan secara penuh, pertumbuhan bisnis kerapu secara keseluruhan diharapkan akan membawa dampak meningkatnya devisa negara dan kesejahteraan lapisan bawah masyarakat yang hidup dengan mata pencaharian dibidang perikanan, selain itu modernisasi penangkapan dan budidaya ikan kerapu akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut khususnya rusaknya terumbu karang.

Dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perikanan kabupaten situbondo Pasal 16 bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dinas perikanan di bidang perikanan budidaya. Berkaitan dengan hal ini Dinas perikanan kabupaten situbondo terus berupaya memaksimalkan budidaya ikan kerapu dengan mengajak masyarakat. Namun, saat ini program pembibitan ikan kerapu masih menghadapi kendala yaitu rendahnya pengetahuan teknologi budidaya dan keterbatasan modal.

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya ialah bagaimana implementasi program pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan program pembudidayaan ikan kerapu di Situbondo kerapu di Kabupaten Situbondo ?

II. METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Jalan Basuki Rahmat No 107 . Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Program Pembudidayaan Ikan Kerapu (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo).

Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu 1 bulan. Pada bulan 25 November 2019 s/d 25 Desember 2019.

Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember). Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan di Kabupaten Situbondo. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang seksi produksi perikanan budidaya dinas perikanan Kabupaten Situbondo.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informa

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam

menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan yang dipilih yaitu orang yang paling tahu tentang Implementasi Program Pembudidayaan Ikan Kerapu yaitu : Bapak Iwan Setyawa selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, Bapak Agus selaku Staf SUNGRAM, beserta 3 orang pembudidaya ikan kerapu di Kabupaten Situbondo.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang

dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalan data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (peer debriefing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo

Dinas perikanan Kabupaten Situbondo memiliki tugas membantu dan mensukseskan program-program bupati dan wakil bupati Situbondo di bidang kelautan dan perikanan. Terhitung sejak tanggal 29 Pebruari 2008 seiring diterapkannya PP No. 41 Tahun 2007 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo menjadi Dinas tersendiri dengan nama "Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo" yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perbup No. 18 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten berubah nama menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Program Pembudidayaan Ikan Kerapu

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi cukup

besar dalam bidang perikanan. Namun, penangkapan ikan yang dilakukan secara terus menerus lambat laun akan menurunkan potensi ikan yang ada di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini menerapkan program pembudidayaan ikan, salah satunya ikan kerapu. Ikan kerapu dipilih karena merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai jual cukup tinggi tak hanya didalam negeri bahkan di luar negeri.

Mengenai pembudidayaan ikan di Kabupaten Situbondo Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo melaksanakannya melalui Bidang Perikanan Budidaya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Pasal 16 yang berbunyi : Bidang perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Perikanan Budidaya.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Halaman 40 : Dinas Perikanan mempunyai program pengembangan budidaya perikanan yang kegiatannya pembenihan kerapu percontohan.

Standar dan Tujuan Kebijakan Program Pembudidayaan Kerapu

Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo telah mengimplementasikan program pengembangan budidaya perikanan yang salah satu kegiatannya adalah pembenihan kerapu percontohan dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021. standar indikator yang digunakan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan. Sedangkan sasaran program program pengembangan budidaya perikanan yaitu meningkatnya produksi sub sektor perikanan. Strategi peningkatan sub sektor perikanan : peningkatan akses dan ketersediaan ikan baik budidaya maupun tangkap, penguatan usaha produksi baik budidaya ataupun tangkap, melaksanakan pengendalian sumberdaya perikanan. Upaya peningkatan produksi perikanan : gerakan bazar ikan dan menggalakkan nelayan untuk menepi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pemberian bantuan

sarana dan prasarana budidaya ataupun tangkap, menyiapkan personil KAMLA dan polair serta pokmaswas untuk ikut serta mencegah illegal fishing atau pelanggaran lainnya.

Dalam program pengembangan budidaya perikanan kegiatannya yang berkaitan dengan kerapu ialah program pembenihan kerapu percontohan.

Untuk tercapainya sasaran dari tujuan pembudidayaan perikanan di Kabupaten Situbondo di perlukan target capaian, mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“UPT PBAPAT mempunyai target pembenihan ikan kerapu percontohan kurang lebih 60.000 ekor per tahun. untuk menambah pengetahuan mengenai pembudidaya ikan kerapu para pembudidaya diberi pelatihan oleh provinsi di UPT provinsi yang diadakan setiap tahun dan pelatihan tersebut dilakukan selama 3 sampai 4 hari. Selain itu para pembudidaya ikan kerapu diberi bantuan hibah dari kementerian dan provinsi yang melalui Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo berupa benih ikan, sarana berupa jaring dan prasarana berupa pakan. Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo sendiri tidak memberikan bantuan hibah karna kebijakan pemerintah daerah tidak ada anggaran hibah untuk kegiatan tersebut sehingga bantuan hanya berasal dari kementerian dan provinsi yang melalui Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Mengenai akses ketersediaan ikan kerapu budidaya para pembudidaya ikan kerapu di Kabupaten Situbondo memiliki sebuah kelompok yang bernama kelompok PERPILA (Perkumpulan Pembudidaya Ikan Laut) yang terdiri dari seluruh pembudidaya ikan kerapu se Kabupaten Situbondo. Dalam kelompok PERPILA saling berbagi informasi pembelian pakan, pembelian benih dan penjualan ikan kerapu yang sudah siap konsumsi. Selain itu juga bisa bertukar

pendapat mengenai penyakit dan cara penanganannya. Untuk mempromosikan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo, Dinas Perikanan mengadakan vestifal kerapu dan membuat wisata kampung kerapu. ” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 desember 2019)

Selain keterangan dari kepala UPT PBAPAT, peneliti juga melakukan wawancara

dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai target pengembangan perikanan budidaya dalam program pembelian kerapu percontohan sudah terlampaui setiap tahunnya. Jika target tersebut tidak terlampaui maka akan dipanggil oleh bupati untuk ditanyakan permasalahan apa yang ada dilapangan dan akan dicarikan solusinya.” (wawancara dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, 16 desember 2019)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu di Kabupaen Situbondo, yaitu sebagai berikut :

“Pembudidayaan ikan kerapu saat ini telah meningkatkan perekonomian yang semula hanya memiliki pendapatn sedikit saat ini pendapatannya meningkat dengan adanya pembudidayaan ikan kerapu.Mengenai bantuan sarana dan prasarana nelayan diberi bantuan berupa benih namun tidak selalu diberi hanya diberi sekali saja.Mengenai pelatihan nelayan tersebut belum pernah mengikuti pelatihan namun pembudidaya tersebut mengetahui kalau ada pelatihan untuk membudidayakan ikan kerapu.Nelayan tersebut pernah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatian namun akhirnya digantikan oleh teman satu kelompoknya.” (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu,Orang pertama, 17 septembrer 2019)

Dari penjelasan diatas, standar dan tujuan program pembudidayaan ikan kerapu sudah

sesuai dengan standar dan tujuan dalam model implentasi Van Hont dan Van metter. Pada model implementasi Van Hont dan Van Meter dijelaskan bahwa standar dan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Dalam pogram pembudidayaan ikan kerapu memiliki standar yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dan memiliki tujuan yaitu meningkatnya produksi sub sektor perikanan.

Sumber Daya

Di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo sumber daya manusianya sudah sangat memadai.Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga.

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan.Dalam Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo masing-masing program sudah memiliki anggaran, termasuk program pengembangan Budidaya perikanan, yang terkait dengan kerapu kegiatannya pembenihan kerapu percontohan.Selain itu, faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan adalah sumber daya sarana dan prasarana karena Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Situbondosebanyak 64 orang, berdasarkan tingkat pendidikan :

- Starata 2 (pasca sarjana) : 11 orang
- Starata 1 (sarjana) : 19 orang
- Diplomat 3 (DIII) : 4 orang
- SMU/SLTA : 28 orang
- Smp/SLTP : 2 orang

Dalam rangka melaksanakan program pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo di perlukan sumberdaya yang memadai baik, mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo pada UPT perikanan budidaya

air payau/ air tawar terdapat tenaga teknis perikanan sebanyak 11 orang, terdiri dari 5 orang tenaga teknis pembesaran udang percontohan dan 6 orang tenaga teknis pembenihan . terdiri dari lulusan sarjana sebanyak 1 orang , lulusan D3 sebanyak 3 orang, dan lulusan SMA sebanyak 7 orang.

Dari segi Sumberdaya di UPT PBATAP Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo para pegawainya memiliki pengalaman yang didapat melalui pelatihan pelatiahn yang diikuti oleh para pegawai.Selain itu para pegawai di UPT PBATAP cenderung menetap yang membuat mereka memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan pembenihan ikan kerapu.Dari segi sumberdaya keuangan program pembenihan ikan kerapu sudah memiliki anggaran yang memadai, anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional, biaya pembenihan, dan bahan materil. Dari segi sarana dan prasarana di UPT PBATAP sudah memadai, sarana dan prasarana tersebut diantaranya berupa tandon, bangsal, tempat panen dan alat alat yang diperlukan untuk pembenihan ikan kerapu, hanya saja UPT PBATAP masih memiliki laboratorium.” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 desember 2019)

Dari penjelasan di atas, mengenai sumber daya dalam program pembudidayaan ikan kerapu sudah sesuai dengan sumber daya dalam model implementasi Van Hont dan Van Metter. Pada model implementasi Van Hont dan Van meter dijelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Pada program pembudidayaan ikan kerapu sumberdaya manusia sudah memadai dan sudah berpengalaman dalam membudidayakan ikan kerapu selain itu sumberdaya keuangan dan sarana dan prasarana sudah memadai.

Komunikasi Organisasi Pelaksana

Dalam melaksanakan program pembudidayaan ikan kerapu Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo melakukan komunikasi

dengan instansi lain. Instansi tersebut yaitu Balai Budidaya Air Payau (BBAP) dan Unit Budidaya Laut Kembang Sambi. Program pengembangan budidaya perikanan berkaitan dengan instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Pecaron. Selain itu, program ini juga dapat bekerjasama dengan Unit Budidaya Laut Kembang Sambi, dibawah naungan Dinas Perikanan Prop. Jawa Timur.

Mengenai komunikasi antar Dinas Perikanan dan organisasi lainnya dalam rangka melaksanakan program pembudidayaan ikan kerapu peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Dalam perogram pengembangan budidaya perikanan terlebih dahulu SUNGRAM mengkomunikasikannya dengan bidang perikanan budidaya, lalu bidang perikanan budidaya mengkomunikasikannya dengan UPT PBATAP. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo juga bekerjasama dengan BBAP dan UBL kerjasama tersebut dalam rangkamembeli telur ikan kerapu dan untuk melihat penyakit ikankerapu di laboratoriu milik BBAP dan UBL” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 desember 2019)

Dari penjelasan di atas komunikasi antar organisasi pelaksana dalam pembudidayaan ikan kerapu sudah sesuai dengan komunikasi antar organisasi pelaksana dalam model implementasi Van Hont dan Van Meter. Pada model implementasi Van Hont dan Van Meter dijelaskan bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain. Dalam program pembudidayaan ikan kerapu Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo melakukan komunikasi dengan Balai Budidaya Air Payau (BBAP) dan Unit Budidaya Laut (UBL).

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Dinas Perikanan, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau Situbondo telah sesuai dengan apa yang diharapkan yakni memahami kebijakan

pengembangan budidaya perikanan dan telah menjalankan tugasnya. Terkait tugas dan kewajibannya mereka sangat responsif dalam menjalankan tugasnya. Begitupula dengan masyarakat pembudidaya ikan kerapu mereka sudah bisa menerima kebijakan tersebut dan telah melaksanakan kebijakan tersebut, membudidayakan ikan kerapu melalui keramba jaring apung (KJA).

Mengenai organisasi yang terlibat dalam program pembudidayaan ikan kerapu peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Organisasi yang terlibat pada program pengembangan budidaya perikanan dalam kegiatan pembenihan kerapu percontohan terdiri dari organisasi formal dan non formal. “Organisasi formal yang terlibat diantaranya BPAP dan PBL, sedangkan organisasi non formal yang terlibat adalah PERPILA. Pegawai UPT PBATAP telah memahami tentang program pengembangan perikanan juga telah memahami dan menjelaskan tugas dan kewajibannya.” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 september 2019)

Dari penjelasan di atas, karakteristik agen pelaksana dalam pembudidayaan ikan kerapu sudah sesuai dengan karakteristik agen pelaksana dalam model implementasi Van Hont dan Van Meter. Pada model implementasi Van Hont dan Van Meter dijelaskan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan peran agen pelaksananya. Dalam pembudidayaan ikan kerapu organisasi formal yang terlibat adalah Balai Budidaya Air Payau (BBAP) dan Unut Budidaya Laut (UBL), sedangkan organisasi non formal yang terlibat adalah perkumpulan pembudidaya ikan laut (PERPILA). Baik pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo maupun para pembudidaya

ikan kerapu saat ini telah menerima program pembudidayaan ikan kerapu.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi lingkungan di Kabupaten Situbondo sudah cukup mendukung program pengembangan budidaya perikanan khususnya kegiatan pembenihan kerapu percontohan. Dinas Perikanan sebagai penyedia bibit ikan kerapu, kemudian masyarakat membelinya untuk dipelihara di keramba apung milik masyarakat. Selain itu kondisi ekonomi dan sosial dan politik juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program.

Mengenai kondisi ekonomi sosial dan politik Kabupaten Situbondo apakah mendukung atau tidak terhadap pembudidayaan ikan kerapu, peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Dari segi perekonomian pembudidaya ikan kerapu dapat meningkatkan perekonomian dimasyarakat contohnya pada Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo disana terdapat panti-panti benih, pembelian pakan dan pembelian telur ikan kerapu yang mayoritas pekerjaannya adalah masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari lingkungan sosial sudah sangat mendukung program pengembangan budidaya perikanan misalnya info pasar yang jelas, selain itu pembudidaya diluar Kabupaten Situbondo juga mendukung para pembudidaya tersebut dengan cara membeli benih ikan kerapu dari Kabupaten Situbondo. Dilihat dari lingkungan politik di Kabupaten Situbondo saat ini memiliki peraturan bahwa kapal luar negeri tidak boleh memasuki kawasan perairan Indonesia yang menyebabkan produksi ikan kerapu peminatnya berkurang.” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 desember 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai peningkatan perekonomian nelayan pembudidaya ikan kerapu, program pengembangan budidaya perikanan telah meningkatkan perekonomian para pembudidaya per kecamatan. Para pembudidaya ada yang diberi bantuan dan telah dibina oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo rata-rata pembudidaya sebelumnya bekerja sebagai nelayan dan ada juga yang pengangguran, namun Dinas Perikanan lebih mengutamakan pengangguran untuk diajak membudidayakan ikan kerapu. Bantuan tersebut dapat berupa bibit dan pakan. Berkaitan dengan lokasi yang cocok untuk membudidayakan ikan kerapu Kecamatan Kendit dan Kecamatan Penarukan karena ombak disana tidak besar. Untuk menguatkan usaha produksi ikan kerapu Dinas Perikanan mengadakan penyuluhan dan memberi bantuan. Program pengembangan budidaya perikanan sudah sedikit mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya program pengembangan budidaya perikanan para pembudidaya yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan saat ini memiliki pekerjaan. Semakin banyak produksi perikanan maka semakin meningkatkan perekonomian. Pembudidaya ikan kerapu selain dari Kabupaten Situbondo juga dari luar kota, mereka memperkerjakan masyarakat dari Kabupaten Situbondo.” (wawancara dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, 16 desember 2019)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan dua orang pembudidaya ikan kerapu di Kabupaten Situbondo, informan pertama menyatakan bahwa :

“Untuk lingkungan perekonomian masyarakat pembudidaya sangat mendukung karena pembudidayaan ikan kerapu membutuhkan modal yang cukup besar.” (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, Orang pertama, 17 desember 2019)

Informan kedua menyatakan bahwa :

“Perekonomian masyarakat sudah cukup mendukung pembudidayaan ikan kerapu”. (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, Nelayan ke dua, 17 desember 2019)

Dari penjelasan di atas lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pada pembudidayaan ikan kerapu sudah sesuai dengan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam model implementasi Van Hont dan Van Meter. Pada model implementasi Van Hont dan Van Meter dijelaskan bahwa variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pada program pembudidayaan ikan kerapu baik dari kondisi lingkungan, ekonomi dan politik kabupaten situbondo sudah mendukung program pembudidayaan ikan kerapu.

Sikap Pelaksana

Pelaksana program pengembangan budidaya perikanan diantaranya adalah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau Situbondo.

UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau Situbondo menerima program pengembangan budidaya perikanan yang kegiatannya berkaitan dengan kerapu. Di UPT telah dilaksanakan pembenihan ikan kerapu yang selanjutnya akan di jual kepada masyarakat pembudidaya ikan kerapu.

Mengenai sikap pelaksana program pembudidayaan ikan kerapu peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai program pembudidayaan ikan kerapu dalam kegiatan pembenihan kerapu percontohan UPT PBATAP saat ini telah menerima kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh UPT PBATAP. Dalam melakukan kegiatan pembenihan kerapu percontohan di UPT PBATAP ada 6 orang tenaga teknis pembenihan terdiri dari lulusan D3 perikanan dan lulusan SMK perikanan. Mereka tentunya memiliki keahlian dalam pembenihan ikan kerapu. Selain mendapatkan

keahlian melalui pendidikan mereka juga mendapat keahlian melalui pelatihan-pelatihan yang di ikuti oleh para pegawai. Selain itu pegawai di UPT PBATAP cenderung menetap yang membuat mereka berpengalaman dalam pembenihan ikan kerapu. Untuk penjualan ikan kerapu pembudidaya memiliki organisasi yang bernama PERPILA disana para pembudidaya saling bertukar informasi mengenai pembelian pakan, pembelian benih, dan penjualan ikan kerapu. Di PERPILA juga ada penyuluh dari pusat yang di tugaskan di kabupaten situbondo dimana ketika pembudidaya tidak menemukan pemilih maka penyuluh akan mencarikan pembeli karena penyuluh tersebut memiliki jaringan sesama penyuluh se Indonesia.” (wawancara dengan kepala UPT PBATAP Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 desember 2019)

Mengenai kinerja kebijakan pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo peneliti juga melakukan wawancara dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai penjualan ikan kerapu tidak hanya dijual didalam negeri namun dijual juga di luar negeri. ikan kerapu yang dijual di dalam negeri hanya sedikit, penjualannya melalui pengepul dan pengepul tersebut yang akan menjual ke bali, surabaya dan jakarta. Jenis ikan kerapu yang dijual seperti kerapu cantang dan kerapu macan. Sedangkan untuk jenis kerapu tikus dijual keluar negeri karna harganya sangat mahal. Penjualan ikan kerapu keluar negeri melalui pasar gelap, ikan kerapu dibeli di tengah laut agar tidak ada biaya ekspor. Untuk penjualan diluar negeri biasanya menggunakan calo yang menggunakan kapal indonesia, prosesnya dari situbondo dikirim menggunakan kapal indonesia keperbatasan lalu diperbatasan akan dibawa oleh kapal luar negeri.” (wawancara dengan staf bagian SUNGRAM bapak Agus, 16 september 2019)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu di Kabupaten Situbondo, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai penjualan ikan kerapu pembudidaya biasanya menjualnya ke Jakarta dan bali. Selain itu pembudidaya juga menjual ikan kerapu ke luar negeri. Untuk penjualan ke luar negeri biasanya tidak langsung menggunakan kapal dari luar negeri, melainkan menggunakan calo yang menggunakan kapal Indonesia dari perbatasan menuju lokasi keramba jaring apung, lalu dari lokasi membawa ikan kerapu ke perbatasan menggunakan kapal Indonesia, setelah sampai di perbatasan ikan kerapu di bawa menggunakan kapal luar neger. Ini disebabkan karena kapal asing tidak diperbolehkan melewati kawasan laut situbondo. Biasanya penjualan ikan kerapu ke luar negeri di lakukan di malam hari”. (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, 17 desember 2019)

Dalam penjelasan diatas, sikap pelaksana dalam pembudidayaan ikan kerapu kurang sesuai dengan sikap pelaksana dalam model implementasi Van Hont dan Van Meter. Pada model implementasi Van Hont dan Van Meter dijelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam program pembudidayaan ikan kerapu Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau Situbondo saat ini menerima program pembudidayaan ikan kerapu. Di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau telah dilaksanakan pembenihan ikan kerapu. Namun, saat ini masih ada pasar gelap untuk menjual ikan kerapu.

Kinerja Kebijakan

Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha budidaya keramba jaring apung (KJA) pada setiap kecamatan berpantai. Usaha keramba jaring apung (KJA) di Kabupaten Situbondo berada di 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Bungatan,

Kecamatan Jangkar, dan Kecamatan Banyu Putih. Luas usaha budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA) sekitar 2,65 ha (Total 2.940 lubang dan 2.336 lubang kondisi sekarang), 94 pelaku usaha perorangan, kelompok, dan perusahaan swasta. Sedangkan usaha pembenihannya dilakukan oleh 70 hatchery skala rumah tangga (HSRT), sementara usaha pengglondongan masih terbatas sekitar 10 pelaku baik di tambak maupun di bak/kolam pasangan.

Pengembangan usaha budidaya KJA saat ini masih belum optimal dikarenakan usaha ini Pada tahun 2018 jumlah ikan yang berasal dari budidaya di keramba jaring apung (KJA) mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kerapu yang diproduksi sebanyak 100,43 ton. Sedangkan Pada tahun 2018 jumlah ikan yang berasal dari KJA sebanyak 94,21 ton. Menurun sebanyak -6,19%. Penurunan pencapaian target produksi budidaya di KJA ini dikarenakan : harga konsumsi ikan kerapu masih rendah, Biaya produksi masih tinggi, dan adanya penyakit parasit pada saat awal tebar. Harga ikan kerapu saat ini juga sudah mengalami penurunan yang semula 1 kg kerapu bisa di jual dengan harga RP 120.000 daat ini mengalami penurunan meenjadi 80.000 per Kg.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo tahu 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

- **2014**
ditarjetkan meningkat 10%, realisasi capaian pada tahun ini sebesar 20,26 Ton (100%)
- **2015**
ditarjetkan meningkat 10%, realisasi capaian pada tahun ini sebesar 8,72 Ton (100%)
- **2016**
ditarjetkan meningkat 10%, realisasi capaian pada tahun ini sebesar 7.482,33
- **2017**
ditarjetkan meningkat 10%, realisasi capaian pada tahun ini sebesar 8.230,58
- **2018**
ditarjetkan meningkat 10%, realisasi capaian pada tahun ini sebesar 9.053,62

Mengenai kinerja kebijakan pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo peneliti

melakukan wawancara dengan kepala UPT PBAPAT bapak Iwan, yaitu sebagai berikut :

“Program pengembangan perikanan budidaya saat ini dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selain itu program tersebut juga sudah didukung dengan modal yang memadai, modal itu digunakan untuk pengembangan sarana berupa pagar dan prasarana berupa tandon, untuk biaya operasional seperti pembelian telur, pakan dan obat, dan gaji pegawai.

Ikan kerapu dijual di dalam dan luar negeri. Di Indonesia dijual ke Bali, Surabaya, dan Jakarta. Sedangkan diluar negeri dijual ke negara Hongkong, Cina, dan Vietnam. Ikan kerapu dijual dalam keadaan hidup dan mati, namun lebih mahal ikan kerapu yang dijual dalam keadaan hidup. Penyebab produksi ikan kerapu menurun diantaranya penyakit dan pasaran sepi.” (wawancara dengan kepala UPT PBAPAT Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu bapak Iwan, 16 Desember 2019)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga pembudidaya ikan kerapu, informan pertama menyatakan :

“Mengenai penjualan ikan kerapu dijual ke Bali dan Jakarta. Juga dijual ke luar negeri seperti Jepang, Hongkong dan Thailand. Biasanya untuk penjualan keluar negeri ikan kerapu dikirim terlebih dahulu ke Bali atau pembeli langsung datang ke lokasi pembudidayaan ikan kerapu karena ikan kerapu langsung dijual ditengah laut. Saat ini harga ikan kerapu sangat menurun hampir separuh harga yang semula ikan kerapu jenis cantik dijual dengan harga Rp.155.000 per kg saat ini Rp.80.000 per kg. Nelayan tersebut memiliki keramba jaring apung sejumlah 21 petak. Kendala pembudidayaan ikan kerapu adanya penyakit pada ikan kerapu.” (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, Orang pertama, 17 Desember 2019)

Informan kedua menyatakan bahwa :

“Untuk penjualan ikan kerapu banyak dijual keluar negeri diantaranya hongkong dan thailand karna di indonesia hanya sedikit yang mau membeli ikan kerapu. Untuk penjualan keluar negeri biasanya para pembeli melakukan pemesanan, setelah ada pesanan pembudidaya menyiapkan ikan kerapu yang sudah siap panen. Setelah ada ikan kerapu perwakilan dari luar negeri mendatangi lokasi pembudidayaan dan langsung memaman ditempat, lalu membawa ikan-ikan kerapu menggunakan khusus pengangkut ikan. Kendala pembudidayaan ikan kerapu adanya penyakit yang menyerang ikan kerapu.” (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, Nelayan ke dua, 17 desember 2019)

Nelayan ketiga menyatakan bahwa :

“Ikan kerapu dijual didalam negeri seperti jakarta dan bali. Selain itu juga dijual ke thailand. Untuk menjualnya orang luar negeri mendatangi lokasi budidaya ikan kerapu menggunakan kapal dan langsung menimbanginya ditengah laut setelah itu ikan kerapu diangkut menggunakan kapal pengangkut ikan. Kendala pembudidayaan ikan kerapu adanya penyakit yang mudah menyerang ikan kerapu. Mengenai penjualan mengikuti harga pasar saat ini harga ikan kerapu turun.” (wawancara dengan pembudidaya ikan kerapu, Nelayan ke tiga, 17 desember 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembudidayaan ikan kerapu sudah cukup efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pembudidaya. Ikan kerapu yang merupakan ikan dengan nilai jual tinggi tidak hanya dijual di Indonesia saja namun juga dijual ke luar negeri. Sejak tahun 2014 sampai 2017 hasil budidaya ikan kerapu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 hasil budidaya ikan kerapu mengalami penurunan.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan tersebut hasil dari penelitian mengenai program

pembibitan ikan krapu di Kabupaten Situbondo Sebagai berikut :

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan Program Pembenihan Kerapu : pelaksanaan program pembudidayaan ikan kerapu Kabupaten Situbondo jika dilihat dari standar dan tujuannya masih belum sepenuhnya mencapai target tujuan kebijakan tersebut dikarenakan pada tahun 2018 hasil produksi ikan kerapu mengalami penurunan.
- b. Sumber Daya : sumber daya manusia dalam program pembudidayaan ikan kerapu sudah memiliki pengalaman, selain itu sumber daya anggaran dalam pembudidayaan ikan kerapu juga sudah memadai.
- c. Karakteristik agen pelaksana : organisasi pelaksana pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo sudah sangat mendukung dalam melaksanakan program pembudidayaan ikan kerapu.
- d. Sikap para pelaksana : . karena pembudidayaan ikan kerapu ini memiliki pengaruh yang baik terhadap pendapatan pembudidaya ikan kerapu maka pembudidaya ikan kerapu menerima dengan baik program pembudidayaan ikan kerapu.
- e. Komunikasi Organisasi Pelaksana : organisasi yang melakukan pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo ialah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo melalui UPT PBAPAT, Balai Budidaya Air Payau (BBAP), dan Unit Budidaya Laut (UBL). Organisasi-organisasi tersebut memiliki hubungan yang baik dalam membudidayakan ikan kerapu.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik : Kondisi lingkungan di Kabupaten Situbondo sudah mendukung program pengembangan budidaya perikanan keramba jaring apung.
- g. Kinerja Kebijakan : Kegiatan pengembangan usaha budidaya jaring apung pada dinas perikanan kabupaten situbondo sudah berjalan dengan baik, namun mengalami penurunan pada tahun 2018.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Program Pembudidayaan

Ikan Kerapu di atas, penulis merekomendasikan beberapa saran antara lain :

1. Pelatihan pembudidayaan ikan kerapu kepada para pembudidaya ikan kerapu untuk tidak hanya dilakukan satu tahun satu kali agar para pembudidaya bisa lebih banyak lagi yang dapat mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan pembudidaya.
2. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo perlu memiliki lablatorium untuk melakukan cek Kesehatan ikan kerapu.
3. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada para pembudidaya ikan kerapu terkait penjualan ikan yang di atur dalam Undang-Undang dan mengajak para pembudidaya untuk tidak lagi melakukan illegal fishing atau penjualan gelap.

- Winarno Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Winarno Budi, (2007) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta
- Winarno Budi, (2008), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta
- Subarsono, (2005), *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Subarsono, (2011), *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tangkilisan Hessel Nogi, (2003), *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung, Yogyakarta
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Agustino Leo, (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Dunn N. William, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hadari Nawawi dan Hadari Martini, (1992), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada Press, Yuyakarta
- Hamidi, (2004), *Metode Penelitin Kualitatif: Aplikasi Praktik Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Moleong J. Lexy, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Rasdakarya, Bandung
- Mathew B. Miles dan Huberman Michael, (1992), *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentng Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta
- undang-undang nomor 21 tahun 2004 tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perikanan kabupaten situbondo
- Anggaran Tahunan 2018 Dinas perikanan Kabupaten Situbondo

DAFTAR PUSTAKA

